

## Kinerja unit PPA Satreskrim Poltabes Bandung dalam penyidikan anak korban kekerasan

Nunuk Setiyowati

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=35528&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Pembentukan jangjian intelijen bagi Satuan Intelkam Polres Sungai Liat bertujuan agar mampu membantu pelaksanaan tugas dalam menjalankan pengumpulan bahan keterangan yang akurat yang menapakan early warning system bagi pimpinan sebagai bagian dan peringatan dial dalam pengungkapan kasus penambangan timah tanpa ijin. Pada akhirnya, setiap informasi yang terkumpul bertujuan agar membantu pimpinan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dan strategis guna . mengungkap setiap kasus penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten Sangka.

Melalui penelitian dengan menggunakan :pendekatan kualitatif dicoba untuk mendeskripsikan fenomena ini yang dikaitkan dengan beberapa teori dan konsep seperti: teori manajemen 6 M, konsep intelijen dan konsep administrasi intelijen, serta konsep efektivitas operasional kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan laporan informasi intelijen dalam pengungkapan kasus penambangan timah tanpa ijin oleh Satuan Intelkam Polres Sungai Liat dijalankan dengan penyelenggaraan administrasi intelijen untuk menjalankan TOTAL DETEKSI yang meliputi tahapan-tahapan perencanaan, pengumpulan bahan keterangan, proses pengoajian produk intelijen, dan proses penyelesaian produk intelijen.

Efektivitas laporan informasi intelijen dalam pengungkapan kasus penambangan timah tanpa ijin di Polres Sungai Liat dilihat dari output yang dihasilkan dua satuan kerja di Polres Sungai Liat dikatakan belum memadai disbanding dengan sasaran operasi kepolisian terhadap para penambang liar. Hal ini terlihat dari Bag Ops hanya mampu melakukan satu kali operasi kepolisian saja selama bulan Januari hingga Desember 2009 dan Sat Peskrim hanya mampu mengungkap 6 buah kasus saja selama bulan Januari hingga Desember 2009.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas laporan informasi intelijen bagi Polres Sungai Liat dalam pengungkapan kasus penambangan timah tanpa ijin disebabkan oleh beberapa hal, yakni: (1) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; (2) Tidak mencukupinya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas; (3) Masih kurangnya ketersediaan prasarana guna menunjang tugas; dan (4) Keterbatasan sarana transportasi untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Melihat hasil penelitian ini penulis menyarankan agar untuk meningkatkan produktivitas kinerja satuan intelkam, sepatutnya pimpinan mempertimbangkan adanya peningkatan anggaran operasional, mengingat tanpa adanya anggaran yang mencukupi, pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh tiap-tiap satuan kerja di Polres Sungai Liat, sepatutnya disediakan. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, sangat sulit bagi anggota untuk dapat melaksanakan kegiatan kerjanya secara baik

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yang dilakukan dengan reduksi data, mernadukan

data sekunder, temuan di lapangan dengan teori, sajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam pembahasannya menggunakan konsep Kinerja Organisasi, teori Manajemen, konsep Kekerasan terhadap Anak, konsep Anak, konsep Penyidikan Anak, konsep Kepuasan Pelanggan, konsep Pelayanan Polri, dan konsep Unit PPA.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja PPA Sat Reskrim Polwiltabes Bandung dalam penyidikan korban kekerasan belum optimal. Kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki masih terbatas terutama (Warna memberikan konseling kepada korban, serta tidak adanya sarana prasarana serta anggaran penyidikan yang memadai). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PPA yaitu faktor internal dan eksternal, baik yang mendukung maupun menghambat. Sedangkan rekomendasi dari penelitian ini antara lain perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan kejuruan PPA, perlunya anggota PPS. mempunyai Sertifikat Penyidik Madya perlu penganggaran dan sarana prasarana yang semestinya, dan kerjasama dengan instansi terkait untuk pembangunan rumah aman, perlunya pendampingan anak sebagai korban oleh orang tua, perlunya dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Bandung serta sosialisasi tentang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.